

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakkan hukum terhadap tambang pasir di Kabupaten Bone Bolango, di Kecamatan Botupingge, Desa Tanah Putih belum mendapatkan aturan hukum yang lebih terfokus. Ini di karenakan aturan hukum yang berlaku tidak di terapkan secara maksimal oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan, alasannya karena penggalian pasir tersebut merupakan mata pencaharian dari para penambang tersebut.
2. Dampak yang di timbulkan akibat pembajakan galian pasir di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango terdiri atas dua bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seperti membantu pemerintah dalam menetralsisir normalisalisasi sungai, sedangkan dampak negatif yang akan terjadi jika penggalian pasir tersebut tidak di hentikan yaitu runtuhnya jembatan talumolo dua yang merupakan jalan menuju kantor Gubernur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memeberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penegakan hukum itu sendiri pihak instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan kepolisian harus lebih tegas terhadap para

penambang sehingga para penggali pasir tersebut paham akan aturan hukum yang harus di taati.

2. Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan itu sendiri harus lebih bekerja secara optimal agar penggalian pasir dapat terkontrol sehingga masyarakat penambang pun dalam melakukan kegiatan penggalian bisa menjaga kelestarian lokasi galian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1998, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Joko Subagyo. 1999, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Erwin. 2009, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan dan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukti fajar, Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Nandang Sudrajat. 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- N.H.T Siahaan. 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam Jakarta, Jakarta.
- Salim HS. 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Sukandarrumidi. 2009, *Bahan Galian Industri*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supriadi. 2010, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani. 2008, *Pengantar Hukum Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Dasar Pasal 18, Tentang Pemerintah Daerah

*Undang-undang No 11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan*

Undang-undang No 4 tahun 2009, Tentang Pertambangan

*Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup*

➤ **Sumber Lain**

Kamus Ilmiah

Naskah Akademik